



## Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo

Aln Pujo Priambodo<sup>1\*</sup>, Nur Wahyu Hidayat<sup>2</sup>  
 Kementerian Keuangan RI<sup>1</sup>, Pemerintah Kabupaten Wonosobo<sup>2</sup>  
[aln.pujo@gmail.com](mailto:aln.pujo@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurwahyuhidayat0@gmail.com](mailto:nurwahyuhidayat0@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding author

**Keywords:** *PAD, DAU, DBH, Capital Expenditure, Regional Economic Growth, Poverty.* **ABSTRACT**

The purpose of this study is to determine the impact of Regional Own Generated Funds (PAD), General Allocation Funds (DAU), Revenue Sharing Funds (DBH), and local government capital expenditures on economic growth (PDRB) and poverty levels in Sidoarjo Regency. This research utilizes multiple linear regression analysis method through SPSS software version 25 in data processing. The PAD, DAU, DBH, capital expenditure, GRDP, and poverty data used in this study are taken within period of 2014 to 2020. The results of the study showed that PAD, DAU, DBH, and capital expenditure together did not have a significant effect in increasing economic growth. However, partially, PAD has a significant positive impact on economic growth while DAU, DBH, and capital expenditures have no significant effect even though they affect GRDP growth. In the poverty model, the results show that PAD, DAU, DBH, and local government capital expenditures, either simultaneously or partially, do not have a significant impact in reducing poverty levels in Sidoarjo Regency.

**Kata Kunci:** *PAD, DAU, DBH, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Tingkat Kemiskinan.* **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan belanja modal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini memanfaatkan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 25 dalam pengolahan data. Data PAD, DAU, DBH, belanja modal, PDRB, dan tingkat kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini berada dalam rentang tahun 2014 hingga tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DBH, dan belanja modal secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, secara parsial, PAD memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan DAU, DBH, dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan walaupun mendorong pertumbuhan PDRB. Dalam model tingkat kemiskinan, hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DBH, dan belanja modal pemerintah daerah, baik secara simultan maupun parsial, tidak memiliki dampak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

JEL CLASSIFICATION: H72, I31

**How to cite:** Priambodo, A.P., Hidayat, N.W. (2024). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 8(1). p.1-14.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.  
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

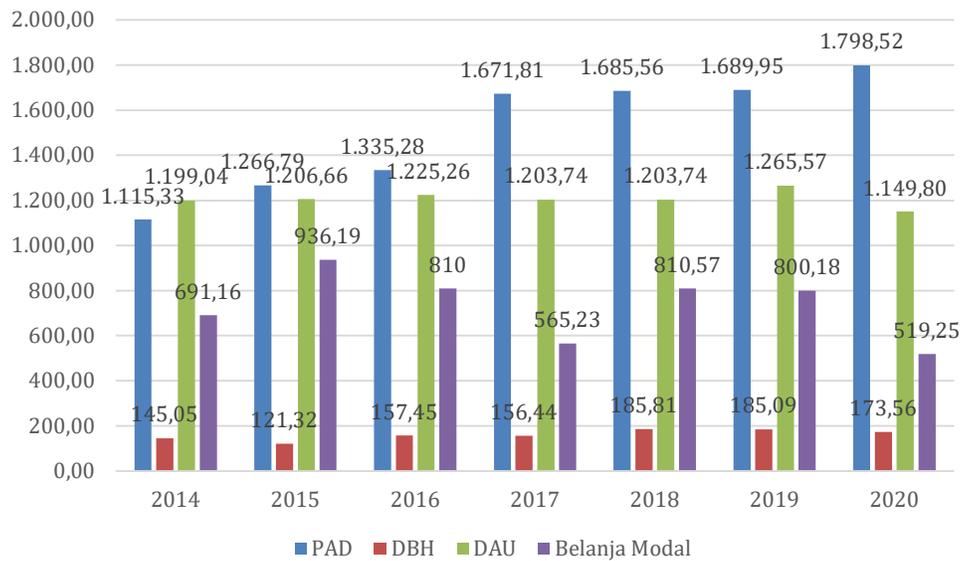
## **PENDAHULUAN**

Praktik otonomi daerah di Indonesia secara resmi dimulai sejak disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Uliansyah, 2021). Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengatur urusan rumah tangganya secara lebih mandiri, termasuk dalam mengelola belanja daerah dan menatausahakan pendapatan daerah.

Implementasi otonomi daerah tidak bisa dipisahkan dengan konsep desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan sebagai sumber pendanaan atas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah (Uliansyah, 2021). Christia & Ispriyarso (2019) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan potensi ekonomi di daerahnya untuk menyelesaikan masalah di daerah. Dengan kata lain, dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan agenda prioritas daerah.

Sumber pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan pendapatan lainnya. Kebijakan desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk menghasilkan dan memungut PAD, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Di sisi lain, TKDD—yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa—menjadi sumber pendanaan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik (Christia & Ispriyarso, 2019).

Dengan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan komponen belanja modal dalam menyediakan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Penambahan fasilitas sarana dan prasarana akan menstimulus laju pertumbuhan ekonomi (Risqiyah & Yunani, 2022). Selain itu, pendapatan daerah, baik dari komponen PAD maupun TKDD, harus dimanfaatkan secara tepat sehingga dapat membiayai operasional pemerintahan dan menjalankan roda perekonomian daerah.



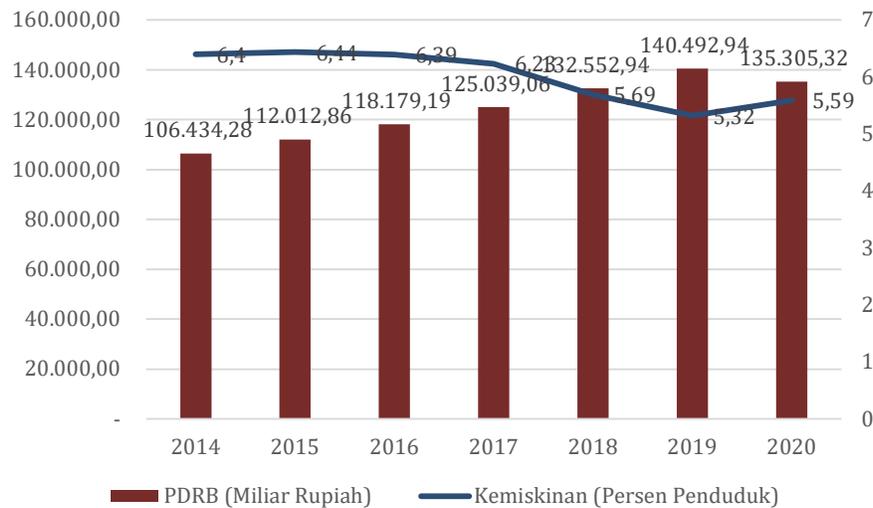
Grafik 1. Realisasi PAD, DBH, DAU, dan Belanja Modal Kabupaten Sidoarjo, 2014-2020  
 Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Diolah Kembali

Tabel 1. Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Target	798,97	815,01	740,48	911,48	864,95	1.016,47	1.311,37
Realisasi	691,16	936,19	810	565,23	810,57	800,18	519,25
Serapan	86,51%	114,87%	109,39%	62,01%	93,71%	78,72%	39,60%

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Diolah Kembali

Seperti dalam Gambar 1, PAD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kecenderungan untuk meningkat dari tahun 2014-2020 sedangkan komponen DBH dan DAU mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Walaupun memiliki PAD, DBH, dan DAU yang terbilang tinggi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki realisasi belanja modal yang relatif rendah. Dilihat dari Tabel 1, serapan belanja modal mencapai lebih dari 100% hanya di tahun 2015 dan 2016. Di tahun yang lain, realisasi belanja modal tidak mencapai target yang telah dianggarkan dalam APBD. Berkaca dari pendapat Sari et al. (2018) dan Rahmawati & Ishak (2020), rendahnya penyerapan menunjukkan rendahnya *value for money* APBD sehingga dapat menghambat pergerakan roda ekonomi dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2. PDRB dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2020  
Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, Diolah Kembali

Terlepas dari realisasi belanja modal yang relatif kecil terhadap pendapatan PAD, DBH, dan DAU, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo, yang tercermin dari PDRB, memiliki tren positif dari tahun ke tahun seperti dalam Gambar 2. Sejalan dengan hal tersebut, kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo juga berangsur-angsur turun dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Namun, di tahun 2020, efek pandemi covid-19 berhasil menyebabkan PDRB sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya dan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.27% di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan seberapa besar dampak PAD, DBH, DAU, dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangi kemiskinan. Metode analisis regresi linier akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian diharapkan dapat menghadirkan wawasan, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merumuskan kebijakan atas pengelolaan PAD, DBH, DAU, dan belanja modal Kabupaten Sidoarjo.

## Kajian Pustaka

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana terdapat peningkatan produksi barang dan jasa (Kurniawati & Muzdalifah, 2022). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah biasanya tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Maulana & Masbar, 2018; dan Kurniawati & Muzdalifah, 2022). Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah akan menjadi lebih baik seiring dengan peningkatan PDRB.

Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh setidaknya 2 faktor, yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi (Jhingan M., 2012 dalam Risqiyah & Yunani, 2022). Faktor ekonomi meliputi sumber daya alam, modal, tata kelola organisasi, kapasitas dan skala produksi, dan budaya kerja. Di sisi lain, faktor non ekonomi mencakup faktor sosial dan budaya, sumber daya manusia, politik, dan administrasi serta birokrasi.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang kekurangan sumber daya, baik berupa uang maupun barang, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjamin keberlangsungan hidupnya. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep basic needs approach dimana masyarakat miskin diukur dari rata-rata pengeluaran per bulan per kapita di bawah garis kemiskinan (Ningrum & Nuryadin, 2021). Menurut Alviannor & Fahrati (2021), kemiskinan dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap tindak kriminal, dan ketidakberdayaan dalam mengambil keputusan hidup sendiri.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pungutan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu daerah. PAD bersumber dari pungutan berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Kurniawati & Muzdalifah, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal (Sulaeman & Silvia, 2019). Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk dapat menggali dan menggunakan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari potensi daerah masing-masing.

### **Dana Alokasi Umum**

Christia & Ispriyarso (2019) mengungkapkan bahwa DAU atau Dana Alokasi Umum merupakan instrumen desentralisasi fiskal untuk pemerataan fiskal. Dengan kata lain, DAU merupakan alat yang digunakan pemerintah pusat untuk menangani ketimpangan fiskal yang terjadi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta ketimpangan yang terjadi antar pemerintah daerah. Besaran DAU ditetapkan berdasarkan celah keuangan (Adriawan et al., 2022) atau kebutuhan moneter yang belum mampu ditutup dengan keuangan daerah secara mandiri.

### **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil pendapatan yang masuk ke dalam rekening pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH dibagikan berdasarkan persentase tertentu kepada daerah penghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal pusat dan daerah, serta kepada daerah non penghasil untuk menanggulangi eksternalitas negatif atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah. DBH tersusun dari 2 sumber, yaitu DBH Pajak, dan DBH Sumber Daya Alam (Megasari & Wahidahwati, 2022).

Penggunaan DBH tidak memiliki syarat tertentu dalam penggunaannya (Sulaeman & Silvia, 2019) sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan DBH ke dalam pos-pos pengeluaran daerah secara bebas. Namun, Retno & Widiatmoko (2019) berpendapat bahwa

DBH seharusnya dapat digunakan sesuai dengan agenda pemerintah daerah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya pelayanan publik.

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah di samping belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja lainnya. Belanja modal dialokasikan untuk pembelian atau pembangunan aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja modal juga digunakan untuk investasi pembangunan (Kurniawati & Muzdalifah, 2022).

Sebagian besar penyediaan sarana dan prasana untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat didanai dengan anggaran belanja modal pemerintah. Belanja modal berperan penting dalam pemberian pelayanan publik oleh pemerintah (Retno & Widiatmoko, 2019) dan dalam pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor (Novitasari & Novitasari, 2019). Dana belanja modal dapat berasal dari PAD maupun komponen TKDD.

### **Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan studi literatur, beberapa peneliti terdahulu telah menemukan dampak PAD, DAU, DBH, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan walaupun secara terpisah.

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Kurniawati & Muzdalifah (2022) menemukan bahwa PAD, DAU, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian Sulaeman & Silvia (2019) juga mengungkapkan bahwa ekonomi regional di Indonesia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan PAD, DAU, dan DBH. Kontra dengan temuan Kurniawati & Muzdalifah, Penelitian Retno & Widiatmoko (2019) di Provinsi Sumatera, Jawa, dan Bali menyimpulkan bahwa pengeluaran belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan kemiskinan, penelitian Syamsul (2020) yang dilakukan pada 33 pemerintah provinsi di Indonesia menemukan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Sedikit berbeda, Adriawan et al. (2022) menemukan bahwa PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sedangkan alokasi DAU berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Dalam penelitian yang lain, Isramiwarti, Rasuli, & Taufik (2017) mendapatkan hasil bahwa komponen PAD, DBH, dan belanja daerah memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin sedangkan DAU memiliki pengaruh yang tidak cukup signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PAD, DAU, DBH, dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rentang waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dapat dilihat di situs resmi pemerintah. Data pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan peneliti dapatkan dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo sedangkan data realisasi PAD, DAU, DBH, dan belanja modal Kabupaten Sidoarjo didapatkan dari situs portal data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

### Teknik Analisis

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan model analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 25. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen (Risqiyah & Yunani, 2022). Dengan kata lain, aplikasi metode regresi linier berganda ditujukan untuk menjelaskan kausalitas variabel PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan tingkat kemiskinan. Sebagaimana dalam konteks penelitian ini, pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan tingkat kemiskinan merupakan variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini. PAD, DAU, DBH, dan belanja modal pemerintah daerah berperan sebagai variabel bebas atau independen. Dengan adanya 2 variabel terikat, penelitian ini menggunakan dua pendekatan model regresi linier berganda. Analisis dampak PAD, DAU, DBH, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi digambarkan dalam model berikut:

$$PDRB = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DBH + \beta_4 BM + \varepsilon$$

Dampak variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan disajikan dengan pendekatan model sebagai berikut:

$$TK = \beta_0 + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DBH + \beta_4 BM + \varepsilon$$

Dimana, variabel PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (miliar Rupiah); PAD = Pendapatan Asli Daerah (miliar Rupiah); DAU = Dana Alokasi Umum (miliar Rupiah); DBH = Dana Bagi Hasil (miliar Rupiah); BM = belanja modal pemerintah daerah (miliar Rupiah);  $\beta_0$  = konstanta (intercept);  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = koefisien regresi; dan  $\varepsilon$  = error.

## HASIL DAN ANALISIS

### Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	<b>PDRB (Miliar Rupiah)</b>	<b>Kemiskinan (Persentase)</b>	<b>PAD (Miliar Rupiah)</b>	<b>DAU (Miliar Rupiah)</b>	<b>DBH (Miliar Rupiah)</b>	<b>Belanja Modal (Miliar Rupiah)</b>
<b>Mean</b>	124.288,08	6,01	1.509,03	1.207,69	160,67	733,23
<b>Maximum</b>	140.492,94	6,44	1.798,52	1.265,57	185,81	936,19
<b>Minimum</b>	106.434,28	5,32	1.115,33	1.149,80	121,32	519,25

<b>Std. Dev.</b>	12.646,52	0,46	263,97	34,44	23,15	149,07
<b>Observasi</b>	7	7	7	7	7	7

Sumber: Data diolah

Tabel 2 menunjukkan PDRB tertinggi Kabupaten Sidoarjo berada di tahun 2019, yaitu sebesar 140.492 miliar rupiah. Rata-rata belanja modal Kabupaten Sidoarjo dalam rentang waktu penelitian adalah sebesar 733,23 miliar rupiah. Dari segi komponen pendapatan daerah, rerata PAD, DAU, dan DBH adalah 1.509,03 miliar rupiah, 1,207,69 miliar rupiah, dan 160,67 miliar rupiah.

### Hasil Regresi

Berdasarkan olahan data lewat program SPSS, hasil regresi linier berganda disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t	Sig.
<b>Variabel Independen: PDRB</b>			
Konstanta	-43.295,805	-0,498	0,668
PAD	48,140	4,976	0,038
DAU	0,003	0,081	0,943
DBH	74,387	0,931	0,450
BM	6,863	0,337	0,768
R <sup>2</sup>	0,942		
F-statistic	8,154		
F-statistic (Prob)	0,112		
<b>Variabel Independen: Tingkat Kemiskinan</b>			
Konstanta	11,981	1,790	0,215
PAD	-0,0014	-1,937	0,192
DAU	0,0000015	0,516	0,657
DBH	-0,003	-0,486	0,675
BM	-0,0003	-0,192	0,865
R <sup>2</sup>	0,863		
F-statistic	1,456		
F-statistic (Prob)	0,446		

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS

Berdasarkan perhitungan Tabel 3, hubungan variabel bebas berupa PAD, DAU, DBH, dan belanja modal terhadap PDRB dirumuskan lewat persamaan (1) sedangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel TK diformulakan dalam persamaan (2) sebagaimana berikut:

$$PDRB = -43.295,805 + 48,14 PAD + 0,003 DAU + 74,387 DBH + 6,843 BM \quad (1)$$

$$TK = 11,981 - 0,0014 PAD + 0,0000015 DAU - 0,003 DBH - 0,0003 BM \quad (2)$$

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, persamaan (1) dapat disebut dengan model pertumbuhan ekonomi dan persamaan (2) dapat disebut dengan model tingkat kemiskinan.

### Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dalam variabel R<sup>2</sup> dalam Tabel 3. Untuk model pertumbuhan ekonomi, nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,942 berarti bahwa 94,2% pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh PAD, DAU, DBH, dan belanja modal pemerintah. Di sisi lain, R<sup>2</sup> model tingkat kemiskinan sebesar 0,863 berarti bahwa 86,3% tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang ada. Dengan kata lain, sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar persamaan—faktor lain menjelaskan 5,8% model pertumbuhan ekonomi dan 13,7% model tingkat kemiskinan.

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistic atau tingkat probabilitas F-statistic. Nilai probabilitas F di bawah 0,05 ( $\alpha=5$ ) menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Seperti dalam Tabel 3, nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,112 dalam model pertumbuhan ekonomi berarti bahwa variabel PAD, DAU, DBH, dan BM secara simultan tidak berpengaruh terhadap PDRB. Di sisi lain, probabilitas F-statistic model tingkat kemiskinan (0,446) turut menunjukkan tidak berpengaruhnya variabel-variabel bebas dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

### Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji t statistik) dapat dilihat dari nilai signifikansi variabel independen dalam Tabel 3. Uji parsial menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat secara individual.

Hasil regresi untuk pertumbuhan ekonomi menunjukkan hanya variabel PAD yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas kurang dari  $\alpha$  ( $0,038 < 0,05$ ). Variabel bebas lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05—signifikansi DAU=0,943, DBH=0,450, dan BM=0,768.

Dalam model tingkat kemiskinan, keseluruhan variabel PAD, DAU, DBH, dan BM tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi (probabilitas) setiap variabel bebas yang lebih besar dari 0,05.

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum menginterpretasikan model persamaan regresi lebih lanjut, model penelitian haruslah dinyatakan lulus dari asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

Model Persamaan	Asymp. Sig. (2-tailed)
Model Pertumbuhan Ekonomi	0,200
Model Tingkat Kemiskinan	0,200

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS

Deteksi normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov smirnov. Tabel 4 menunjukkan bahwa kedua model persamaan memiliki signifikansi sebesar 0,200. Nilai signifikansi di atas 0,05 berarti bahwa data terdistribusi secara normal. Dengan kata lain, uji normalitas terpenuhi.

Tabel 5. Deteksi Multikolinieritas

Variable	Tolerance	VIF	Keterangan
<b>Model Pertumbuhan Ekonomi</b>			
PAD	0,708	1,412	Lulus
DAU	0,880	1,136	Lulus
DBH	0,610	1,639	Lulus
BM	0,501	1,997	Lulus
<b>Model Tingkat Kemiskinan</b>			
PAD	0,708	1,412	Lulus
DAU	0,880	1,136	Lulus
DBH	0,610	1,639	Lulus
BM	0,501	1,997	Lulus

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS

Tabel 5 menunjukkan statistik multikolinieritas yang didapatkan dalam hasil regresi linier. Suatu variabel dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas apabila memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan memiliki VIR kurang dari 10. Dengan demikian, variabel independen dalam model regresi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan dapat dinyatakan lulus dari uji multikolinieritas.

Tabel 6. Hasil Uji Glejser

Model Persamaan	t	Sig.
<b>Model Pertumbuhan Ekonomi</b>		
PAD	-0,251	0,825
DAU	-1,155	0,368
DBH	0,932	0,450
BM	-1,561	0,259
<b>Model Tingkat Kemiskinan</b>		
PAD	-0,459	0,691
DAU	-1,135	0,374
DBH	0,819	0,499
BM	-1,378	0,302

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS

Pembuktian indikasi heteroskedastisitas dalam model dilakukan dengan uji glejser—meregresikan nilai absolut dari residual terhadap variabel independen. Dengan nilai signifikansi variabel PAD, DAU, DBH, dan BM dalam kedua model sebagaimana terlihat dalam Tabel 6, gejala heteroskedastisitas tidak terjadi di dalam kedua model regresi linier.

Tabel 7. Hasil *Run Test*

Model Persamaan	Asymp. Sig. (2-tailed)
Model Pertumbuhan Ekonomi	0,952
Model Tingkat Kemiskinan	0,431

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS

Selanjutnya, gejala autokorelasi dibuktikan dengan *Run Test*. Melihat Tabel 7, model pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi sebesar 0,952 sedangkan signifikansi model tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,431. Signifikansi di atas 0,05 menandakan bahwa gejala autokorelasi tidak terjadi.

### **Analisis Dampak PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil regresi linier berganda yang telah dilakukan, koefisien variabel independen menunjukkan porsi peran setiap variabel independen terhadap variabel terikat. Efek variabel PAD, DAU, DBH, dan belanja modal pemerintah daerah dapat dilihat dalam Tabel 3 atau persamaan (1). Nilai koefisien PAD ( $\beta_1$ ) adalah sebesar 48,14; koefisien DAU ( $\beta_2$ ) = 0,003; koefisien DBH ( $\beta_3$ ) = 74,387; dan koefisien belanja modal ( $\beta_4$ ) = 6,843.

Berdasarkan hasil analisis model pertumbuhan ekonomi, dampak setiap variabel bebas terhadap PDRB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel PAD berpengaruh positif dalam meningkatkan PDRB. Koefisien PAD ( $\beta_1$ ) yang bernilai 48,14 dapat ditafsirkan bahwa setiap kenaikan PAD satu satuan akan meningkatkan PDRB sebesar 48,14 satuan;
2. Setiap kenaikan DAU sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan PDRB sebesar 0,003 miliar rupiah atau sebesar 3 juta rupiah;
3. Dalam model ini, DBH memiliki dampak paling besar di antara variabel bebas lain.  $\beta_3$  sebesar 74,387 menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 miliar DBH akan menyumbang 74,387 miliar rupiah ke PDRB; dan
4. Sama seperti variabel bebas lain, belanja modal pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki koefisien sebesar 6,843 yang berarti bahwa setiap tambahan 1 satuan belanja modal akan meningkatkan PDRB sebesar 6,843 satuan juga.

### **Analisis Dampak PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan**

Sama halnya dengan subbagian sebelumnya, analisis dampak PAD, DAU, DBH, dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat lewat koefisien variabel independen. Hasil regresi untuk model tingkat kemiskinan menunjukkan koefisien setiap variabel, yaitu  $\beta_1 = -0,0014$ ;  $\beta_2 = 0,0000015$ ;  $\beta_3 = -0,003$ ; dan  $\beta_4 = -0,0003$ . Selain itu, konstanta sebesar 11,981 menunjukkan persentase rakyat miskin sebesar 11,981% jika tidak ada alokasi PAD, DAU, DBH, dan belanja modal—setiap variabel independen bernilai 0.

Dilihat dari koefisien setiap variabel, 3 dari 4 variabel independen, yaitu PAD, DBH, dan belanja modal, berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap penambahan PAD, DBH, dan belanja modal akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Lebih jauh lagi, dampak variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap kenaikan PAD 1 miliar akan membantu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -0,0014 persen;
2. Berbeda dengan variabel lain, DAU memberikan dampak positif dalam meningkatkan tingkat kemiskinan. Pertambahan DAU setiap satu satuan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,000015 satuan;
3. Melihat nilai  $\beta_3$ , pengaruh DBH dalam mengurangi tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,003. Hal tersebut berarti bahwa setiap satuan DBH akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,003 persen; dan
4. Belanja modal memiliki dampak negatif sebesar -0,0003 terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menyadari beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan data dari tahun 2014 hingga 2020. Selain itu, penelitian ini juga hanya menggunakan empat variabel bebas, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan belanja modal pemerintah daerah sehingga kurang dapat menunjukkan realita yang sesungguhnya.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa (1) PAD, DAU, DBH, dan belanja modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap peningkatan PDRB maupun tingkat kemiskinan, (2) PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sedangkan DAU, DBH, dan belanja modal berpengaruh positif secara tidak signifikan, dan (3) secara parsial, tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan meskipun PAD, DBH, dan belanja modal mendorong penurunan tingkat kemiskinan.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan atas penelitian di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong dan memaksimalkan potensi daerah. Selain itu, penggunaan PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan anggaran belanja modal harus lebih dimaksimalkan manfaatnya sehingga dapat mencapai *value for money* yang berimplikasi dalam peningkatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, sumber penerimaan (PAD, DAU, dan DBH) dapat fokuskan untuk pendanaan belanja yang memiliki implikasi langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, program pembinaan UMKM, program investasi pembangunan manusia, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriawan, R., Rahman, A., & Iwang, B. (2022). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 226–234.
- Alviannor, & Fahrati, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 75–87.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2011 SD 2015. *PEKBIS*, 9(3), 195-213.
- Kurniawati, & Muzdalifah. (2022). Pengaruh PAD dan DAU Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 16–28.
- Maulana, I., & Masbar, R. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus: Indonesia Bagian Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(1), 80–88.
- Megasari, S., & Wahidahwati. (2022). Pengaruh PAD, DBH, dan DAK terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Ningrum, E. W., & Nuryadin, M. R. (2021). Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Kemiskinan di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 113–126.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174–186.
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180–189.
- Retno, N. D., & Widiatmoko, J. (2019). PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 23–35.
- Risqiyah, W., & Yunani, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 68–80.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 38–43.
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 4(1), 97–112.
- Syamsul. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *AKUNTABEL*, 17(1), 140–147.
- Uliansyah, B. A. A. (2021). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. In *APBN IN DEPTH: MENGULIK APBN LEBIH DALAM* (pp. 60–75). Politeknik Keuangan Negara STAN.